**EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA)**

KEC TEMPE. KABUPATEN WAJO

Sri Wahyuni

Ahwal Al-Syakhsiyah, fakultas syariah dan hukum IAI As'Adiyah Sengkang

Nurnajmia, Ismail

Ahwal Al-Syakhsiyah, fakultas syariah dan hukum IAI As'Adiyah Sengkang

Abstrak

Calon suami istri yang akan menikah perlu persiapan yang baik agar pernikahannya dapat berjalan dengan baik dan dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang bahagia. Persiapan tersebut dapat berupa pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, dan segala syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan. Calon pasangan suami istri dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang pernikahan dan mampu untuk mempertahankan keutuhan keluarganya dengan baik nantinya. Oleh karena itu, calon pasangan perlu diberikan bimbingan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, bimbingan ini disebut dengan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah dimaksudkan untuk pembekalan utama bagi calon pengantin dalam membangun keluarganya kelak sebab ternyata banyak pengantin yang mengalami kecemasan dalam menghadapi detik-detik pernikahannya, selain itu banyak pula hal yang menjadi penyebab kecemasan-kecemasan yang dialami oleh calon pengantin. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan memakai metode kualitatif yang sumber datanya 70% dari wawancara dan observasi selebihnya menggunakan sumber data sekunder yang bersal dari beberapa buku, jurnal dan artikel yang terkait

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sunnatullah Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Semua makhluk Allah terutama manusia sebagai umat muslim diharuskan untuk menikah karena menikah setengah ibadah dari agama Islam. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt telah diciptakan dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh sya'riat. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah QS. An-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga

*orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²

Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha Bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Dan dalam rangka menumbuhkan kenyamanan tersebut maka kedua belah pihak, harus berusaha semakin mengenal calon pasangan hidupnya, termasuk mengenal keluarga masing-masing³.

Jadi sebaiknya calon suami dan istri memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga atau rumah tangga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal untuk mencegah perceraian. Maka perlulah adanya bimbingan perkawinan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Bimbingan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dakwah yaitu mangazatkan diri pada kegiatan menolong orang lain. Bahkan bimbingan bukan hanya menolong tetapi memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang, berupa petunjuk, memberi nasehat, memberikan informasi serta mengarahkan. Oleh karena itu, bimbingan sangat diperlukan bagi seseorang individu atau sekelompok orang, secara terus-menerus dan sistematis.

Agar individu atau kelompok tersebut, menjadi pribadi yang mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari.⁴

Bimbingan yang diberikan pada pasangan yang akan menikah bertujuan untuk membangun kekuatan keluarga. Kekuatan keluarga tersebut terwujud apabila dalam keluarga pasangan suami istri dan anggota keluarga dapat memiliki komitmen keluarga, menikmati waktu yang menyenangkan bersama anggota keluarga, kemampuan menangani stres dan krisis secara efektif, memiliki kesehatan spritual, komunikasi yang positif dan kasih sayang. Oleh karena itu bimbingan perkawinan pranikah intinya membangun keterampilan agar pasangan suami istri dapat melakukan hal tersebut dan menghindari yang namanya perceraian.

Namun berdasarkan hasil observasi awal penulis bahwa ternyata Bimbingan

Perkawinan Pranikah di Kabupaten Wajo belum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan untuk mengurangi angka perceraian. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Pengaruh Bimbingan Perkawinan Pranikah terhadap penurunan angka perceraian.

METODE

Metode penelitian merupakan cara atau langkah yang akan digunakan dalam mencapai hasil penelitian serta menyangkut masalah kerjanya yang berupa prosedur dan teknik penelitian. Dalam mencapai penelitian yang diakui secara ilmiah serta untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas dengan data-data yang valid dan terstruktur, maka penulis akan menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan sifat penelitiannya yaitu penelitian kualitatif yang merupakan sifat penelitian yang digunakan untuk menganalisis data-data sehingga dapat mencapai hasil akhir penelitian dan peneliti menjadi instrument kuncinya. Adapun sumber data yang digunakan yaitu Sumber Primer yaitu sumber data yang menjadi target pertama dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi langsung dilapangan yaitu di Kec.Tempe. Sumber Sekunder yaitu sumber data yang berfungsi sebagai rujukan tambahan dan pelengkap data primer yang keduanya saling melengkapi dan saling terikat antara satu dan yang lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku -buku,jurnal dan artikel terkait dengan bimbingan pranikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Menurut Syubandono, bimbingan Pra Nikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.⁵

Hal inilah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, memberikan bimbingan, wejangan, penasehatan kepada para calon pengantin, untuk mematangkan diri memasuki bahtera rumah tangga yang tentu tidak mudah.

Adapun yang menjadi dasar dilaksanakannya bimbingan Pra Nikah ini menurut Bapak Ilham Nur selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, bahwa:

Setiap orang sebagai muslim dan muslimah, nikah itu merupakan persyaratan yang harus dilalui sebelum hidup sebagai pasangan suami istri, maka tentu dasarnya adanya Al-Quran Karim sebagai perintah Allah swt, kedua adalah perintah Nabi saw, dan dasar ketiga adalah kemaslahatan social.⁶

Dari pendapat di atas, penulis dapat memahami bahwa dasar hukum yang dijelaskan oleh Bapak Ilham Nur adalah hal yang sangat fundamental dari perkawinan. Diskursus terkait dengan perkawinan telah penulis gambarkan pada bab sebelumnya dimana perkawinan merupakan perintah Allah swt dan rasulnya. Maka tentu dengan diadakannya bimbingan Pra Nikah ini, sebagai bentuk upaya untuk mengawal perintah Allah swt dan rasulnya.

Secara normative, bimbingan Pra Nikah ini memiliki regulasi tersendiri di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muh. Sakri selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe bahwa: “bimbingan Pra Nikah memiliki regulasi tersendiri”.⁷ Regulasi yang dimaksud oleh Bapak Muh. Sakri di atas adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Adapula Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.

Tujuan dari pelaksanaan bimbingan Pra Nikah ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Sakri selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo berikut:

Bimbingan Pra Nikah ini dilaksanakan untuk memperkenalkan kepada para calon pengantin tata cara membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah⁸

Tujuan dari pelaksanaan bimbingan Pra Nikah ini juga telah dijelaskan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab II, Pasal 2 bahwa:

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang

kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Dari penjelasan-penjelasan di atas, penulis dapat memahami bahwa bimbingan Pra Nikah ini sangat penting keberadaannya untuk dilaksanakan. Selain itu bimbingan Pra Nikah ini merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap pentingnya membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Terkait dengan prosedur pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe Bapak Ilham Nur memberikan penjelasan sebagai berikut:

Para calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat umur, Identitas berkas yang sah, mengikuti prosedut di KUA.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa sebelum mengikuti bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama, maka hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan calon pengantin adalah:

1. Usia perkawinan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”.¹¹ Ini merupakan aturan terbaru, menggantikan aturan sebelumnya yang menjelaskan bahwa: “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita berusia 16 (enam belas) tahun”.¹²

2. Identitas para pihak

Identitas ini menjadi penting untuk dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak Kantor Urusan Agama, agar terang dan jelas status para pihak. Status yang dimaksud meliputi jenis kelamin, hubungan keluarga, agama dan juga status perkawinan dengan pihak lainnya.

3. Prosedur Perkawinan di Kantor Urusan Agama

Setelah para pihak melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe akan mengatur jadwal pelaksanaan bimbingan Pra Nikah, materi-materi yang akan diberikan, dan siapa yang akan menjadi pemateri dalam kegiatan bimbingan tersebut. Calon pengantin yang telah mengikuti Bimbingan Pra Nikah akan diberikan bukti kelulusan berupa sertifikat yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin telah mengikuti bimbingan Pra Nikah.

Mengenai prosedur pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tempe, Bapak Saifullah selaku penyuluh juga turut menyampaikan bahwa:

Tahap pelaksanaan dimulai dengan membuat materi bimbingan, menyusun jadwal bimbingan, menyampaikan materi bimbingan dan melakukan evaluasi kepada calon pengantin.¹³

Evaluasi yang dimaksud oleh Bapak Saifullah dilaksanakan dengan proses tanya jawab santai antara pembimbing/ pematery dengan para calon pengantin.

Terkait dengan tempat pelaksanaan bimbingan Pra Nikah, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ilham Nur selaku penyuluh. Dalam wawancara tersebut, Bapak Ilham Nur mengatakan bahwa:

Tempat yang disediakan sebagai tempat pelaksanaan bimbingan Pra Nikah adalah di KUA, di Kementerian Agama, atau apabila jumlah pasangan calon pengantin dalam jumlah besar, maka disediakan tempat yang lebih luas, agar dapat mengakomodir semua pasangan calon pengantin.¹⁴

Artinya bahwa tempat pelaksanaan bimbingan Pra Nikah bisa menyesuaikan dengan kondisi yang dialami.

Terkait dengan durasi waktu pelaksanaan bimbingan Pra Nikah Bapak Saifullah selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe mengatakan bahwa “Durasi yang diperlukan untuk menyampaikan bimbingan Pra Nikah kepada peserta kurang lebih 2 jam”.¹⁵

Sementara dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pada pasal 8 ayat 4 menyatakan bahwa “materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran”.¹⁶ Dari perbedaan antara hasil wawancara di atas dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, penulis menilai bahwa hal ini terjadi sebagai bentuk pengkondisian dari keadaan yang terjadi di masyarakat Untuk materi yang disampaikan dalam bimbingan Pra Nikah, menurut Bapak Muh. Sakri, menjelaskan bahwa:

Materi yang disampaikan selama bimbingan Pra Nikah adalah materi-materi dasar tentang perkawinan, tentang fikih juga tentang permasalahan ekonomi. Lebih lanjut Bapak Muh. Sakri

mengatakan bahwa:

Materi dasar ini penting untuk disampaikan sebagai bekal bagi calon pengantin, utamanya terkait dengan masalah fikih, hal dikarenakan mereka yang tidak memahami masalah fikih maka ia akan mudah sekali menjauh dari Allah swt.¹⁸

Terkait dengan penjelasan di atas, penulis sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muh. Sakri, contoh kecil yang dapat penulis berikan adalah masalah mandi junub. Hal ini tentu penting diketahui oleh pasangan pengantin, agar mereka paham apa yang harus dilaksanakan setelah berhubungan suami istri.

Namun jika berdasar kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, materi kursus pra nikah atau bimbingan Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok Dasar;

Materi yang tergolong kelompok dasar ini berupa Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang KDRT, Undang-undang Perlindungan Anak dan fikih munakahat

2. Kelompok Inti;

Materi yang tergolong dalam kelompok ini berupa pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

B. Pada kelompok ini pembimbing/ pemateri akan memberika pre test dan post test untuk calon pengantin. Tingkat Keberhasilan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Sebagaimana telah penulis tuliskan sebelumnya bahwa tujuan dari pelaksanaan bimbingan Pra Nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab II, Pasal 2 yaitu:

untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka keberhasilan bimbingan Pra Nikah di Kantor

Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tempe, yang dapat menjawabnya adalah warga masyarakat yang menjadi objek dari bimbingan Pra Nikah tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara langsung dengan warga masyarakat yang ada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe. Salah seorang warga yang berhasil penulis wawancarai adalah Bapak Nasruri sebagai salah satu lulusan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, beliau mengatakan bahwa:

Setelah mengikuti bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, saya lebih memahami tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, tanggung jawab yang tentunya akan saya bawa menghadap kepada Allah swt.²⁰

Dari pernyataan di atas, penulis memahami bahwa bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe memiliki kontribusi terhadap perubahan pola pikir pasangan calon pengantin menjadi lebih baik. Hal ini tentu menjadi salah bukti keberhasilan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe membina dan membimbing calon pengantin.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Muh. Yunus salah seorang warga yang juga pernah mengikuti bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, ia mengungkapkan bahwa:

Sewaktu saya hendak menikah saya diwajibkan oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk mengikuti bimbingan Pra Nikah dan saya pun mengikuti bimbingan Pra Nikah tersebut bersama calon istri saya. Setelah beberapa bulan menikah, hubungan saya kandas di tengah jalan. Pada waktu itu usia saya dan istri saya masih 19 tahun.²¹

Dari hasil wawancara di atas, penulis melihat bahwa ternyata keberhasilan bimbingan Pra Nikah itu juga tergantung kepada pasangan calon pengantin. Materi telah diberikan oleh pembimbing/ pemateri, namun penerapan materinya ada pada pasangan calon pengantin. Penulis melihat pula bahwa kematangan psikologis sangat dipengaruhi oleh usia.

Selain mewawancarai warga yang ada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, penulis juga meminta tanggapan dari pelaksana bimbingan Pra Nikah dan melakukan observasi sendiri terkait dengan keberhasilan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe. Hasil yang penulis peroleh adalah pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe

selalu terlaksana dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Darmawati dan Bapak Saifullah selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe. ketika penulis bertanya bahwa apakah bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe pernah tidak terlaksana? Keduanya sama-sama menjawab “tidak pernah”.²²

Hal ini menjadi bukti sikap konsisten pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe dalam menjalankan amanah dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Walaupun memang dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah ini masih ada pula tahap pelaksanaan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Misalnya dalam pemberian materi, jika berdasar kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, materi yang seharusnya diberikan berupa Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang KDRT, Undang-undang Perlindungan Anak, fikih munakahat, pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga, selanjutnya diberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. Namun yang terlaksana, materi yang diberikan hanya seputar materi-materi dasar tentang perkawinan, tentang fikih juga tentang permasalahan ekonomi. Selain itu juga masalah durasi waktu melakukan bimbingan Pra Nikah dimana menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, namun dalam pelaksanaannya durasi yang digunakan menyampaikan materi kurang lebih 2 jam.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

1. Faktor Pendukung

Untuk mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, penulis melakukan wawancara dengan

Bapak Muh. Sakri, beliau mengatakan bahwa:

Hal yang mendukung pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe adalah adanya kemauan dari masyarakat untuk mengikuti dan

mendaftarkan diri sebagai peserta bimbingan Pra Nikah, selain itu pembimbing/pemateri yang dilibatkan juga berkompeten.²³

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Ilham Nur, beliau mengatakan bahwa:

“Yang menjadi pendukung terlaksananya bimbingan Pra Nikah ini adalah kompetensi dari para pembimbing/ pemateri, penyampaian yang dilaksanakan dengan santai dan tidak menghakimi serta sarana dan prasarana seperti peserta bimbingan Pra Nikah diberikan buku panduan keluarga sakinah dan lain-lain”.²⁴

Hasil wawancara di atas, terkait dengan faktor pendukung pelaksanaan bimbingan Pra Nikah, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Adanya kemauan dari calon pengantin

Objek dari bimbingan Pra Nikah ini adalah para calon pasangan yang hendak memasuki bahtera rumah tangga. Kemauan dari calon pengantin ini dibuktikan dengan kehadiran dan kesediaan dari para calon pengantin mengikuti bimbingan Pra Nikah.

b. Pembimbing/ pemateri yang berkompeten

Hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah adalah para pembimbing/ pemateri yang sudah berkompeten. Pihak yang terlibat sebagai pembimbing/ pemateri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penyuluh dan Penghulu. Sementara untuk bimbingan Pra Nikah di tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Kementerian Agama, pemateri yang dihadirkan jauh lebih banyak dengan latar belakang kompetensi yang berbeda-beda pula.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Bab V dijelaskan bahwa narasumber/ pengajar untuk bimbingan Pra Nikah terdiri dari:

Konsultan Keluarga;

1) Tokoh Agama;

- 2) Psikolog;
 - 3) Profesional di bidangnya.²⁵
- c. Sarana dan prasarana

Sarana yang mendukung dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo seperti disediakannya modul bimbingan Pra Nikah, kipas angin, penerangan (lampu) yang sudah lengkap di dalam ruangan bimbingan Pra Nikah.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, juga disebutkan tentang sarana yang terdapat pada pasal 4. Dalam pasal tersebut dituliskan bahwa: “kementerian agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul”.²⁶

- d. Metode penyampaian materi

Tanggung jawab pemateri kepada para peserta bimbingan Pra Nikah adalah melakukan pembinaan, memberikan nasihat, wejangan dan mematangkan kedua mempelai lewat materi- materi yang akan disampaikan dalam bimbingan Pra Nikah. Materi dalam bimbingan Pra Nikah ini tidak akan sampai, apabila diberikan kepada peserta bimbingan dalam keadaan tertekan. Hal inilah yang menyebabkan para pemateri dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe memilih menggunakan metode ceramah atau diskusi.

Metode penyampaian materi juga diatur secara lengkap dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pasal 8 ayat 2, yang menjelaskan bahwa “Kursus pra nikah dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan”.²⁷

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, dalam melaksanakan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tempe terkadang ditemukan hambatan-hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Kedisiplinan

Adapun wawancara dengan bapak Ilham Nur, selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe dalam wawancaranya berikut:

peserta bimbingan (calon pengantin) yang terlambat datang sangat mengganggu proses berjalannya pelaksanaan bimbingan Pra Nikah karena ketika bimbingan berlangsung ada calon pengantin yang baru datang.²⁸

b. Dana

Adapun wawancara dengan bapak Ilham Nur, selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, beliau mengatakan bahwa:

tidak ada anggaran yang disediakan untuk melaksanakan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanastolo, selain itu tidak ada pula penarikan dana oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin untuk membiayai bimbingan Pra Nikah tersebut.

Sementara itu Bapak Muh. Sakri selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe mengatakan bahwa:

Sebelumnya pernah ada dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan bimbingan Pra Nikah dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per-pasang. Dana ini berasal dari APBD atau APBN. Namun untuk sekarang sudah tidak ada lagi.

Penghentian anggaran untuk bimbingan Pra Nikah ini berdampak pada terbatasnya pembimbing/ penerjemah yang dapat dihadirkan.

c. Keterbatasan Waktu

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan Pra Nikah hanya sekedar saja dilaksanakan dikarenakan limit waktu yang digunakan sangat sedikit. Dalam wawancara dengan bapak Muh. Sakri selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo berikut: “Waktu yang digunakan untuk melakukan bimbingan Pra Nikah kurang lebih 2 jam”.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe secara normative, bimbingan Pra Nikah ini mendapat regulasi dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah ini dimulai dengan pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe akan mengatur jadwal pelaksanaan bimbingan Pra Nikah, materi-materi yang akan diberikan, dan siapa yang akan menjadi pemateri dalam kegiatan bimbingan tersebut. Calon pengantin yang telah mengikuti Bimbingan Pra Nikah akan diberikan bukti kelulusan berupa sertifikat yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin telah mengikuti bimbingan Pra Nikah.

2. Terkait dengan tingkat keberhasilan bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, penulis menilai bahwa pelaksanaan bimbingan Pra Nikah telah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan diadakannya bimbingan Pra Nikah itu sendiri.
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Adanya kemauan dari calon pengantin;
 - 2) Pembimbing/ pemateri yang berkompeten;
 - 3) Sarana dan prasarana;
 - 4) Metode penyampaian materi
 - b. Faktor penghambat
 - 1) Kedisiplinan;
 - 2) Dana;
 - 3) Keterbatasan Waktu

REFERENSI

- Al-Qur'an Al-Karim* Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- Arifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Asnawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004. Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2008.
- Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Tuntunan Praktis Membina Keluarga Sakinah*. Makassar: Departemen Agama, 2008.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1989. Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Yayasan penerbit Fak. Psikologi Ugm, 1978.
- Hasan, Maimunah. *Membangun Surga di Dunia dan di Akhirat*. Cet. I; Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000.
- Hasbi, “Peranan Konselor dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2011).
- Hasyim, Abu. *Risalah Nikah*. Surakarta: Afra Publising, 2009.
- Ilham Nur (45 tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Wawancara. Kartodijo, Sartono *Penggunaan Bahan Dokumen*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Letter, Bgd. M. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Cet.X; Padang: Angkasa Raya, 1985.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Cet. VI, Jakarta: Darus Sunnah, 2009.
- Muhammad, Abiy’Abdullah bin Ismail al-Bukhariy. *Shahih al-Bukhariy*, Jilid III (Beirut-Lebanon: Dar al- Ma’rifah, t.th.
- Muh. Sakri (48 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Wawancara.
- Muh. Yunus (45 tahun), Warga Keca , Wawancara, Tanasitolo. 62
- Munawir, Ahmad Warson. *Arab-Indo p*. Cet. XIV; Surabaya: pustaka progresif,
- Nasruri (44 tahun), Warga Kecamatan wawancara, Tanasitolo.
- Novia, Windy. *Kamus Besar Bahasa Iaya*: Kashiko Press, 2015.
- Nurihsan, Achmad Juntika. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Pusat pengkajian Islam dan Masyarakat, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cet. I; Makassar: IAIN Alauddin Uarassar, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009. Bakhtiar, *Menuju Keluarga Sakinah*. Pekanbaru: CV Realita Utama, 2014.
- Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. New Merah Putih, Yogyakarta, 2009.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

- Salam, Lubis. *Bimbingan Rohani Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya; Terbit Terang, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007. Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Cet I; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. CV Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty, Yogyakarta, 1989. Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sulaiman, Abi Dawud. bin Isa bin al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Saifullah (39 tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Wawancara, Tanasitolo.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dan Pendekatan baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000. Syahraeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar; Alauddin University Press, 2013.
- Syubandono. *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Dan Perkawinan "Marriage"*. Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*.Jurnal; Ta'lim: Vol. 14 No. 2, 2016